

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah serta alasan penulis memilih subjek serta objek yang akan diteliti. Selain itu, terdapat juga perumusan masalah yang menjadi inti penelitian. Perumusan masalah tersebut akan dijawab dengan menggunakan konsep Soft Power dan juga konsep Disaster Diplomacy yang tertuang ke dalam hipotesis penulis. Di akhir bab terdapat metode penelitian, jangkauan dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

A. Latar Belakang

Jepang dan China adalah dua negara tetangga yang terletak di Asia Timur. Kedua negara ini memiliki sejarah hubungan panjang, yang jika ditelusuri, hubungan keduanya bahkan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hubungan kedua negara ini pun sangat menarik untuk diamati. Pada saat Jepang masih menjalankan isolasi politik dari dunia luar, interaksi antara Jepang dan China terjadi cukup intensif dengan alasan perdagangan. Selama kurang lebih 250 tahun semenjak jaman Tokugawa, Jepang memiliki hubungan yang sangat erat meskipun tak memiliki perwakilan resmi di masing-masing negara.

Hubungan Jepang dan China mulai mengalami fluktuasi ketika di Jepang terjadi perubahan kekuasaan dan diambil alih Meiji Tenno. Pengambilalihan kekuasaan ini pun diikuti dengan restorasi Meiji. Restorasi Meiji sendiri adalah keinginan Jepang untuk melakukan modernisasi di setiap sektor. Jepang ingin menjadi negara besar, berkaca kepada negara-negara barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dll. Berbekal semangat revolusi dan kepercayaan diri yang tinggi, Jepang mulai melakukan intervensi terhadap wilayah di luar kekuasaannya dengan Korea menjadi negara pertama yang dikuasainya. Menyusul Korea, Jepang juga ingin menguasai China, akibatnya China dan Jepang kemudian terlibat Perang

besar sekitar tahun 1894-1895 yang kemudian dikenal dengan Perang Jepang-China Pertama. Perang ini berakhir dengan penandatanganan perjanjian Shimonoseki¹ yang menandakan kekalahan China atas Jepang.

Tak berhenti sampai di situ, ambisi Jepang untuk terus menguasai China terus berlanjut. Perang antara Jepang dan China pun tak dapat dihindari dengan terjadi Perang Jepang China kedua yang berlangsung dari tahun 1937-1945. Salah satu insiden yang paling membuat bangsa China bahkan sampai saat ini ialah Insiden Mukden yang terjadi pada 18 September 1937. Puncak kekejaman Jepang adalah pada 13 Desember 1937 ketika tentara Jepang melakukan pemerkosaan terhadap wanita-wanita di wilayah Nanking, peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama Pemerkosaan Nanking. Pada berbagai insiden tersebut, korban jiwa diperkirakan mencapai 300.000 orang².

Setelah Perang Dunia II Jepang dan China tidak memiliki hubungan yang sangat intens karena Jepang sedang berkonsentrasi untuk membangun ulang negaranya pasca kekalahannya pada Perang Dunia II. Baru pada tahun 1972, ketika perdana menteri Jepang Kakue Tanaka berkunjung ke Jepang untuk normalisasi hubungan. Pasca kunjungan tersebut, memang ada sedikit perbaikan pada hubungan keduanya, namun perbaikan tersebut hanya pada perdagangan semata, di sisi yang lain perkembangan hubungan politik seakan tertinggal jauh. Jepang menanggapi bahwa rasa nasionalisme China terlalu berlebihan yang mengakibatkan China bersikap agresif dalam melaksanakan hubungannya dengan negara-negara di Asia Timur maupun negara-negara di sekitar kawasannya. Hal ini diperparah dengan adanya perebutan wilayah antara China

¹ ThoughtCo, *The First Sino-Japan War*, diakses dari <https://www.thoughtco.com/first-sino-japanese-war-1894-95-195784> pada 30 Oktober 2017

² Kompas.com, *Akar Dendam Panjang China kepada Jepang*, diakses dari <http://internasional.kompas.com/read/2012/09/20/0812456/Akar.Dendam.Panjang.China.kepada.Jepang> pada 20 Oktober 2017

dengan beberapa negara seperti Vietnam, Filipina, Korea Selatan maupun Jepang itu sendiri. Selain itu China juga selalu bersikap agresif terhadap negara yang menentang kepentingan politiknya di Selat China dan Taiwan.

Pada tahun 2004 di sela-sela pertemuan APEC, Presiden China Hu Jintao dan Perdana Menteri Jepang Koizumi melakukan pertemuan untuk membahas masalah Taiwan. Dalam pertemuan ini kedua pemimpin negara diharapkan untuk membuat perbincangan mengenai perdamaian terutama di Laut China Timur. Namun hal ini tidak berlangsung karena pada pertemuan ini Presiden China justru menekan Jepang agar tidak untuk ikut campur dalam permasalahan di Taiwan. Hu Jintao memuji tindakan Jepang yang mengapresiasi kebijakan *One Child Policy* China, dan menegaskan dengan jelas bahwa Taiwan adalah bagian dari China³. Dia juga mengingatkan Koizumi bahwa kedamaian dan keamanan di Selat Taiwan adalah suatu hal yang penting oleh karena itu Hu Jintao menghimbau Jepang patuh terhadap hal tersebut agar Kerja sama di antara kedua negara dapat terjaga.

Konflik lain yang bahkan sampai sekarang belum menemukan jalan keluar adalah konflik perebutan Kepulauan Senkaku. Sengketa gugusan Kepulauan Senkaku terdiri dari batu-batu karang dan pulau-pulau tak berpenghuni yang hanya seluas 7 km² inilah yang sampai saat ini masih sering menyulut api perseteruan kedua negara. Baik Tiongkok ataupun Jepang sama-sama mengklaim bahwa gugusan kepulauan yang kaya akan sumber daya alam ini merupakan bagian dari wilayah teritorial negaranya⁴.

China mengklaim bahwa Kepulauan Diaoyu telah masuk ke dalam wilayah China sejak lama yaitu sejak

³ Yun Zhang, *Sino-Japanese Relations in a Trilateral Context*, (New York : Springer Nature, 2017)

⁴ DW, *Hubungan sulit China dan Jepang*, diakses dari <http://www.dw.com/id/hubungan-sulit-cina-dan-jepang/a-16272098>, pada 20 Oktober 2017

pemerintahan Dinasti Ming dan telah dikenal dengan nama Diaoyu. Klaim China tersebut juga diperkuat dengan dokumen sejarah Jepang sendiri yang menjelaskan bahwa kepulauan tersebut adalah milik China. Kontra dengan klaim China, Jepang justru mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku telah masuk ke dalam wilayah kedaulatannya sejak tahun 1885. Klaim ini berlandaskan bahwa pada saat Jepang menemukan kepulauan Senkaku, tidak ada tanda-tanda bahwa pulau ini telah dimiliki oleh suatu negara sehingga menurut hukum *terra nullius*, Jepang dapat secara sah mengklaim wilayah tersebut. Semenjak saat itu wilayah ini masuk ke dalam wilayah Jepang di bawah administratif prefektur Okinawa.

Konflik atas gugusan pulau tak berpenghuni ini telah sering dijadikan agenda bagi kedua negara untuk diselesaikan, namun usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua negara tampak tidak membawa perubahan yang signifikan. Beberapa kali, kedua negara melakukan perjanjian damai seperti pada Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan 1978 ketika kedua negara menyisihkan sengketa atas pulau, namun sentimen-sentimen yang diberikan baik oleh masyarakat Jepang maupun China lagi-lagi membuat perjanjian ini ibarat tak berarti. Dalam kesempatan yang lain pada tahun 1997, ketika China dan Jepang pertama kali bertemu dalam membahas perjanjian perikanan di Laut China Timur. Dalam pertemuan tersebut, China, Jepang dan Korea Selatan membicarakan mengenai pembagian zona memancing. Jepang membawa masalah garis meridian antara kedua negara namun pembahasan tersebut ditolak oleh China.

Kedua negara juga melakukan serangkaian perjanjian pengelolaan bersama (*Joint Development*) pada tahun 2008. Melalui beberapa kunjungan yang dilakukan oleh Presiden China Hu Jianto dengan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda pada tanggal 7 Mei 2008. Dalam pertemuan itu kedua negara sepakat bahwa pengelolaan SDA di Laut China Timur akan dikembangkan bersama-sama, selain itu akan diadakan pertemuan tahunan untuk membicarakan hal terkait, dan yang

terakhir ialah menyepakati untuk melihat hubungan kedua negara secara lebih positif. Akan tetapi tidak lama setelah pernyataan masing-masing negara dengan akan dilaksanakannya *Joint Development*, pihak China memberikan respons yang cenderung pasif bahkan pihak Jepang berulang kali memberikan dorongan untuk mematuhinya. Kefasifan China atas *Joint Development* membuat kesepakatan ini terbengkalai hingga tahun 2010.

Rumitnya hubungan antara kedua negara memerlukan alternatif penyelesaian lain. Dikutip dari Antara News, bahkan China pun berpendapat bahwa seharusnya hubungan antara kedua negara didasarkan pada kerja sama bukan pada faktor historis yang konfrontatif. Menteri Luar Negeri China Wany Yi berkata bahwa “Saya siap mendengarkan pendapat Anda tentang bagaimana meningkatkan hubungan China-Jepang, dan saya juga akan melihat apakah pihak Jepang akan menyesuaikan perkataan dengan perbuatan”⁵. Salah satu alternatif kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara adalah dalam bidang penanganan kebencanaan.

Dalam konteks diplomasi bencana alam, Jepang telah sangat berpengalaman dengan terus menerus memberikan bantuan dengan cara mengirimkan tim darurat bencana hingga bantuan fiskal terhadap negara-negara yang terkena bencana. Bantuan yang dikirimkan Jepang ini tidak hanya terbatas pada negara Asia Timur atau Asia secara umum saja melainkan hingga ke seluruh dunia.

Pengalaman pertama Jepang dalam melakukan pertolongan pasca bencana adalah mengirimkan tim medis ke Thailand untuk membantu para pengungsi Kamboja pada tahun 1979. Terdapat 14 tim dan 407 relawan yang berpartisipasi dalam pengiriman bantuan ini. Beberapa tahun setelahnya, di

⁵ Antara News, *China sebut hubungan dengan Jepang seharusnya berdasarkan kerja sama*, diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/558163/china-sebut-hubungan-dengan-jepang-seharusnya-berdasarkan-kerja-sama> pada 18 Oktober 2017

bawah pengawasan Minister of Foreign Affairs (MOFA) Japan atau Kementerian Luar Negeri Jepang, terbentuklah suatu sistem yang merekrut dan mengirimkan para profesional untuk membantu negara-negara yang terkena bencana. Sebagai aksi tindak lanjut, pada tahun 1987, terbentuklah undang-undang untuk mengesahkan sistem yang dibangun tersebut.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Luar Negeri Jepang, terhitung semenjak tahun 1987 sampai 2012 terdapat sekitar 121 tim yang telah dikirimkan ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia⁶. Pengiriman tim penanganan bencana dari Jepang tidak hanya terdiri dari tim medis ataupun para relawan. Tim yang dikirim juga menyertakan militer yang mulai dikirimkan pada tahun 1992. Pengiriman militer untuk membantu menangani bencana dikarenakan militer memiliki kemampuan dan pengalaman dalam kondisi ekstrim sehingga dapat diandalkan ketika terjadi bencana. Japan Self-Defence Force (JSDF) yang dikirimkan ini memiliki arti peranan yang penting untuk mengubah citra buruk militer Jepang. Salah satu titik balik pengiriman tenaga militer adalah saat bencana Tsunami 2004 yang melanda negara-negara di Samudera Hindia. Pada bencana ini, Jepang mengirimkan hampir 1000 tentara untuk membantu pemulihan pasca bencana.

Jepang unggul dalam penanganan bencana alam bukan hanya terlihat dari manajemen bencana domestik maupun pengiriman tim penanganan bencana. Lebih jauh dari itu, Jepang juga memberikan bantuan-bantuan melalui Official Development Assistance atau bantuan pembangunan. Bantuan ini diberikan melalui edukasi pencegahan bencana, simulasi evakuasi, sistem peringatan dini, dan teknik pemetaan bencana. Jepang juga aktif dalam menginisiasi forum-forum internasional terkait manajemen bencana seperti World

⁶ Yoshiko Yamada dan Daniel Clausen, *Japan's Disaster Diplomacy : Pragmatism, Peace and Activism*, July 5th 2014

Conference on Disaster yang terlaksana di Yokohama pada 1994.

Pengiriman tim penanganan bencana dilakukan secara intens ke hampir setiap bencana besar, tak terkecuali Gempa Bumi Sichuan 2008. Pengiriman tim penanganan bencana juga dikirimkan ke bencana Gempa Bumi Sichuan 2008, yang menjadi gempa bumi paling mematikan di China. Pada saat Gempa bumi Sichuan tahun 2008, Jepang menawarkan bantuan sebanyak 500 Juta Yen yang terbagi menjadi bantuan dana maupun logistik⁷. Jepang juga menjadi salah satu negara yang pertama memberikan bantuan terhadap bencana tersebut dengan mengirimkan kurang lebih 60 petugas. Perdana Menteri Jepang sendiri berkata bahwa "*I extend my condolences and hoped those affected in Sichuan could soon get on with their lives and rebuild their homes.*" Sebagai bentuk belasungkawa terhadap gempa tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk mengetahui bagaimana Jepang melakukan diplomasi bencana alam terhadap China pasca gempa Sichuan 2008.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas, maka Rumusan Masalah yang akan diambil penulis adalah :

Bagaimana penggunaan disaster diplomacy dalam kerja sama kebencanaan yang dilakukan oleh Jepang terhadap China pasca gempa Sichuan 2008?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kerja sama antara China dan Jepang dalam persoalan kebencanaan sebagai sarana mempererat hubungan.

⁷ Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Emergency support for major earthquake in Sichuan Province, China*, diakses dari http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h20/5/1180307_907.html pada 3 November 2017

2. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan bukti, data dan fakta serta membuktikan hipotesis dengan konsep dan teori yang relevan.
3. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S1 Hubungan Internasional di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Soft Power

Joseph S. Nye, Jr dalam bukunya *Soft Power : the Means to Success in World Politics*, menjelaskan bahwa konsep *power* dapat dibagi menjadi dua yaitu *Hard Power* dan *Soft Power*. Nye juga menjelaskan arti penting *Soft Power* dan menjadi elemen yang penting dalam pengambilan keputusan terutama yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Nye juga *Soft Power* dalam hubungan internasional memberikan peran yang signifikan dan tidak bisa diabaikan. Dalam definisi Nye, *soft power* adalah “ *The ability of political body, such as state to indirectly influence the behavior or interest of other political bodies through cultural or ideological means. The basic concept of power is more than just persuasion or ability to move people buy argument, though that is important part o fit. Soft Power also can defined as its ability to attract others by the legitimacy of State’s policies and the values that underlie them.*”⁸

Diartikan bahwa *Soft Power* merupakan suatu keahlian aktor politik misalnya suatu negara, untuk mempengaruhi aktor lainnya melalui budaya atau mungkin juga pemikiran ideologi. Dasarnya adalah *power* merupakan keahlian atau kemampuan seseorang untuk membuat seseorang melakukan yang ia mau, sehingga *Soft Power* dianggap lebih dari sekedar persuasi atau bujukan dengan argumen saja. *Soft Power* dapat dilihat lebih

⁸ Joseph S.Nye Jr, *Soft Power : The Means to Succes in World Politics*, (New York : PublicAffairs, 2004)

dari sekedar pengaruh ketika apa yang dianggap pengaruh tersebut memaknai Hard Power misalnya ancaman maupun imbalan. Soft power memiliki cara sendiri untuk membentuk suatu kerja sama dengan seseorang, bukan dengan ancaman ataupun imbalan, tetapi lebih menggunakan pertukaran nilai-nilai atau kewajiban pada pencapaian nilai-nilai tersebut. Dengan perkataan lain, Soft Power menggambarkan aktivitas kooperatif yang terjadi antar negara dan mempengaruhi norma maupun praktik-praktik dari negara tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud berupa pertukaran budaya, pertukaran pendidikan, kerja sama dalam bidang ekonomi maupun politik.

Penggunaan *Soft Power* dianggap mudah dan efektif dan efisien karena tidak seperti *Hard Power* yang menitikberatkan terhadap kepunyaan alat-alat militer yang memakan biaya yang besar. *Soft Power* lebih mengedepankan persuasif sehingga negara tidak harus mengeluarkan biaya yang besar untuk bisa mempengaruhi keputusan negara lain. Selain itu penggunaan *Soft Power* juga dapat menimbulkan citra dan persepsi positif suatu negara ke negara lain. Soft Power juga memancarkan identitas sebagai daya tarik suatu negara. Identitas ini meliputi kebiasaan, praktis, maupun citra⁹.

2. Konsep Disaster Diplomacy

Disaster Diplomacy memuat dua kata penting yaitu *Disaster* atau bencana dan *Diplomacy*. Menurut Louse K.Comfort, dalam tulisannya mengatakan bahwa isu bencana dapat menjadi isu yang cukup penting dalam peningkatan kehidupan manusia. Bencana tidak hanya didefinisikan hanya dalam artian bencana alam namun juga bencana epidemi seperti Flu Burung, Flu babi, bencana kekeringan, dan isu-isu pemanasan global. Dengan mengartikan bencana sebagai isu

⁹ Utpal Vyas, *Soft Power : What it is and how does it function*, (New York : Routledge, 2011)

global maka akan meningkatkan kesadaran berbagai pihak mengenai penyelesaian masalah tersebut¹⁰.

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, UU Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial dengan pengertian sebagai berikut : **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh kejadian alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dll. **Bencana non-alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh kejadian non-alam namun bukan juga oleh manusia seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror¹¹. Mengutip argumen O'Keefe dalam Buku Ilan Kelman bahwa bencana alam terjadi bukan dengan sendirinya melalui dengan campur tangan manusia. Alam terkadang menyediakan *input* kejadian-kejadian normal seperti banjir maupun gempa vulkanik, namun manusia lah yang membuat kejadian alam itu berbahaya bagi manusia yang lain, dalam argumen ini O'Keefe mengatakan bahwa "*Disaster are not natural, but are social construction*" (Bencana bukan alamiah, namun merupakan konstruksi sosial).

¹⁰ Louise K.Comfort, "*Disaster : Agent of Diplomacy or Change in Internasional Affairs?*", Cambridge Review of International Relation Affairs Autumn - Winter Vol XIV no 1, 2012, hal 279

¹¹ BNPB, Defenisi dan Jenis bencana, diakses dari <https://www.bnpb.go.id/home/definisi>, pada 24 Oktober 2017

Diplomasi menurut S.L Roy adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya¹². Sementara itu Diplomasi menurut Sir Ernest Satow, “*diplomacy is the application of intelligence and tact to conduct of official relations with vassal states or more briefly still, the conduct of business between states by peaceful means*” (Diplomasi adalah penerapan keterampilan taktik pelaksanaan hubungan resmi antar pemerintah negara berdaulat secara damai)¹³.

Dengan kata lain, *Disaster Diplomacy* merupakan diplomasi yang digunakan pada saat bencana terjadi di suatu negara. Ilan Kelman, salah satu akademisi yang mengkaji *Disaster Diplomacy*, dalam bukunya mengatakan bahwa diplomasi bencana mencoba untuk mengetahui mengapa dan bagaimana kegiatan yang berhubungan dengan bencana (*pre-disaster* ataupun *post-disaster*) dapat mempengaruhi konflik dan juga kerja sama. Perencanaan, persiapan, dan aksi tanggap adalah bagian dari aktivitas pre-disaster, atau dikenal juga dengan istilah “*Disaster Risk Reduction*” yang memfokuskan terhadap akar masalah dari bencana itu sendiri. Sementara aktivitas post-disaster meliputi respons, rekonstruksi, dan pemulihan.

Salah satu hal yang digarisbawahi dalam penggunaan *Disaster Diplomacy* bahwa *disaster diplomacy* hanyalah sebuah katalis dan kecil kemungkinan untuk membuat suatu hubungan diplomasi yang benar-benar baru. Dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh para peneliti dalam sejarah, menunjukkan bahwa aktivitas terkait penanganan bencana alam belum pernah memunculkan hubungan diplomasi yang baru dalam artian

¹² S.L Roy “*Diplomasi*”, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995) hal.3

¹³ Op.Cit hal.38

pihak yang mendapat bencana belum pernah memiliki hubungan sama sekali dengan pihak yang membantu menangani bencana tersebut. Namun momentum bencana dapat menjadi katalisator atau pemercepat hubungan yang telah terjalin sebelumnya baik itu dari sektor kebudayaan/kebiasaan, hubungan perdagangan ataupun hubungan ekonomi lain dan hubungan politik serta perbincangan-perbincangan rahasia antara kedua pemimpin negara.

Lebih lanjut, dikemukakan juga bahwa harus ada satu kondisi yang dinamakan *pre-existing basis* yaitu antara kedua negara sudah memiliki hubungan sebelumnya

“Disaster can significantly spur on a diplomatic process that had a pre-existing basis, but a disaster alone is unlikely to generate new diplomacy. Disaster related activities can catalyze, but do not create, cooperation”¹⁴.

Menurut Ilan Kelman di dalam tulisannya yang diambil dari tulisan Ratih Herningtyas, mengatakan bahwa hubungan antar negara sebagai tindak lanjut dari penanggulangan bencana tidaklah bertahan lama, namun dari momentum hubungan tersebut konflik-konflik yang pernah terjadi antar beberapa pihak yang terlibat dapat dikesampingkan. Selain itu, juga terdapat kemungkinan untuk terciptanya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa karena faktor penanggulangan bencana yang dilakukan bersama¹⁵. Selain itu, persepsi bahwa bencana selalu membawa dampak buruk bagi masyarakat tidaklah sepenuhnya benar, walaupun bencana memang membawa kerusakan. Bencana alam dapat menjadi momen yang jika dikelola dengan tepat maka dapat menyelesaikan masalah-masalah politik, konflik, sengketa, maupun pertikaian yang sebelumnya tidak terselesaikan.

¹⁴ Ilan Kelman, *Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict* (Abingdon: Routledge, 2012)

¹⁵ Ratih Herningtyas, “*Penanggulangan Bencana sebagai Soft Power dalam Diplomasi Indonesia*”, *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol 3 No.1 / April 2014

Permasalahan yang dapat ditangani pun bisa mulai dari konflik etnis, nasional, maupun dalam skala internasional. Kelman memaparkan bahwa bencana justru membuka peluang ruang yang baik bagi pihak-pihak yang memiliki kerawanan yang tinggi akan bencana alam untuk bekerja sama bahkan dengan pihak yang kontra atau dengan pihak yang memiliki hubungan yang tidak harmonis sebelumnya untuk mengurangi risiko dari bencana yang ditimbulkan.

Disaster Diplomacy mencoba melihat seberapa besar aktivitas terkait bencana alam baik itu sebelum terjadinya bencana maupun setelah terjadinya bencana dapat mempengaruhi kerja sama antara pihak-pihak yang berkonflik baik secara nasional maupun internasional. Diplomasi dengan menggunakan isu bencana diharapkan mampu mengubah perspektif negara-negara yang memiliki sejarah konflik atau yang sedang memiliki konflik untuk menjadi lebih kooperatif antara satu dengan yang lainnya. Studi Kelman tentang Diplomasi Bencana mendemonstrasikan peningkatan fungsi dari diplomasi bencana. Studinya menunjukkan bahwa bencana dapat dimanfaatkan sebagai alat yang tepat untuk meningkatkan kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Sebagai sebuah aktivitas, diplomasi bencana memiliki tiga alternatif keluaran yang dihasilkan. *Pertama*, Keluaran jangka pendek, yaitu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bencana dalam hitungan minggu maupun bulan dapat namun tidak selalu- mempengaruhi jalannya diplomasi di suatu negara. Keluaran jangka pendek biasanya dilakukan oleh negara-negara yang telah memiliki hubungan diplomatik sebelumnya. *Kedua*, Keluaran jangka panjang (lebih dari setahun), pada tahap ini kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kebencanaan tampak memiliki pengaruh yang lebih terhadap hubungan negara. Contoh faktor non-bencana yaitu ketidakpercayaan, perubahan kepemimpinan, penyelesaian konflik, dll. *Ketiga*, keluaran yang diharapkan ternyata berlawanan dengan hasil yang diperoleh, yaitu memperburuk

hubungan dan mengurangi efektivitas diplomasi bencana yang diharapkannya.

Lebih jauh Ilan Kelman menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Disaster Diplomacy in Aceh* bahwa dalam mendefinisikan *Disaster Diplomacy*, setiap studi kasus perlu menjawab enam pertanyaan. *Pertama*, apakah aktivitas terkait bencana mempengaruhi aktivitas-aktivitas diplomatik seperti pengiriman delegasi maupun kunjungan-kunjungan kepala daerah maupun duta besar atau pembukaan konsuler atau kedutaan di masing-masing negara. *Kedua* apakah terdapat praktik baru diplomasi terkait bencana, dalam hal ini apakah bencana membuka kesempatan kepada suatu negara untuk membentuk suatu hubungan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan sama sekali dan akhirnya membuka hubungan diplomasi baru akibat bencana alam. *Ketiga* bagaimana legitimasi diplomasi terkait bencana, hal ini berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat yang melakukan pendekatan ulang bukan dengan menggunakan isu bencana dalam diplomasi publiknya. *Keempat*, apakah diplomasinya bertahan lama? Walaupun pertanyaan ini sangat subjektif dengan tolak ukur waktu yang tidak bisa dijelaskan dengan pasti, namun Ilan Kelman menjelaskan bahwa waktu “bertahun-tahun” adalah tolak ukur yang cukup untuk membuktikannya. Walaupun dalam beberapa kasus proses diplomasi berjalan dengan singkat yaitu dalam hitungan bulan maupun minggu, namun biasanya proses tersebut cenderung akan memudar dan mendapat hasil yang kurang efektif. *Kelima*, apakah diplomasi yang dilakukan pasca terjadinya bencana memunculkan isu pembangunan keberlanjutan jangka panjang? Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di daerah yang terkena dampak bencana, perubahan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh upaya diplomasi dari negara terkait.

E. Hipotesa

Disaster diplomacy oleh Jepang terhadap China dilakukan melalui

1. Aktivitas *pre-disaster* seperti Perencanaan, persiapan, dan mitigasi.
2. Aktivitas pasca bencana (*post-disaster*) yang meliputi respons, rekonstruksi, dan pemulihan pasca gempa.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, Casel and Simon menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian sosial yang berusaha melakukan deskripsi dan interpretasi secara akurat makna dari gejala yang terjadi dalam konteks sosial, dengan mengedepankan proses memahami objek secara alamiah guna menjamin keakuratan objektifikasi. Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya¹⁶. Sementara itu, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif analitik. Analisis deskriptif digunakan oleh penulis untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana bencana alam dapat digunakan oleh Jepang kepada China dalam melaksanakan diplomasinya. Selanjutnya penulis akan menggunakan metode analitik untuk melihat dan mendeskripsikan kepentingan Jepang atas usaha diplomasi yang dilaksanakan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang diambil penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan studi pustaka (*Library*

¹⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995)

Research). Penulis akan mengumpulkan dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya. Penulis akan memperoleh data dari perpustakaan-perpustakaan maupun website lembaga terkait seperti misalnya Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Kota Yogyakarta, Perpustakaan Pusat UMY, Perpustakaan HI UMY, Situs kementerian Luar negeri Jepang, Situs Kementerian Luar Negeri China, dan berbagai macam situs-situs berita baik dalam maupun luar negeri.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data sekunder. Data-data sekunder meliputi literatur-literatur seperti buku, jurnal, artikel, majalah, surat kabar yang erat hubungannya dengan penelitian yaitu kerja sama pemerintah Jepang dan China dalam bidang kebencanaan baik itu sebelum maupun setelah terjadi nya bencana.

4. Teknik Analisa dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang dalam hal ini masih bersifat sementara. Setelah itu data akan direduksi untuk melihat segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola. Reduksi data dilakukan dengan melakukan organisasi data, baik itu secara manual maupun dari komputer. Hal ini penting untuk dilakukan agar data yang ditampilkan dapat lebih rapi dan bisa dibaca baik oleh peneliti maupun oleh pembaca.

Kemudian, data akan disajikan (*display*) baik berupa tabel, gambar, chart dan lain sebagainya yang kemudian akan diverifikasi melalui teori atau konsep yang sudah dipilih. Dari data yang telah diverifikasi penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis serta dijawab pada bagian-bagian sebelumnya.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang disajikan oleh penulis berupa metode penulisan deduktif. dalam metode penulisan ini, paragraf yang ditulis akan menjelaskan penjelasan umum terlebih dahulu disusul dengan penjelasan secara khusus. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah hubungan dan dinamika hubungan antara Jepang dan China diikuti dengan penjelasan mengenai kerja sama baik itu kerja sama sebelum bencana maupun kerja sama setelah bencana.

G. Jangkauan dan Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah dengan rentang waktu pasca gempa bumi Sichuan 2008. Penulis juga membatasi masalah kerja sama dengan hanya difokuskan pada kebencanaan saja, tanpa menyentuh permasalahan kerja sama lain. Selain itu, negara yang penulis ingin teliti dalam hal ini adalah RRC (Republic Rakyat China)/ PRC (People Republic of China), bukanlah ROC (Republic of China) atau yang sering disebut sebagai Taiwan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, Hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai sejarah bencana yang pernah terjadi di Jepang serta dampak kerusakan yang ditimbulkan. Dalam bab ini juga dibahas mengenai manajemen bencana Jepang sebagai salah satu negara yang memiliki sejarah manajemen bencana yang panjang dan cukup baik.

Bab III membahas mengenai masalah-masalah bencana yang pernah terjadi di China. Pembahasan akan menyajikan data mengenai jumlah bencana dan derajat

kerusakannya. Pembahasan bencana dibatasi pada bencana-bencana terkini. Pembahasan akan berfokus kepada dampak-dampak bencana baik itu dampak ekonomi, sosial hingga dampak politik. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai bagaimana perspektif kemanusiaan dalam melihat dan menanggapi bencana.

Bab IV akan mencoba untuk menjawab hipotesa tentang bagaimana kerja sama antara Jepang dan China dalam bidang kebencanaan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana. Bab ini akan membahas mengenai bagaimana kegiatan-kegiatan pre-bencana alam dan post-bencana alam dilakukan. Pembahasan akan berfokus kepada kerja sama-kerja sama yang dilakukan dengan kisaran waktu beberapa tahun sebelum bencana Sichuan dan Pasca Bencana itu sendiri.

Bab V Penutup Merupakan Bab terakhir yang menyimpulkan keseluruhan isi materi penulisan skripsi ini yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya.